

DAFTAR PUSTAKA

- Bahruzin. 2014. Analisis efektivitas kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat. *Tesis*. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
- Dani AA dan Apriyanto. 2019. Penandaan batas area perhutanan sosial pada Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(1): 30-37.
- Ekawati S, Hariyatno D, Marinus KH, Handoyono, Fentie JS, Bayu S dan Krisno DR. 2015. *Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan*. Bogor, Indonesia.
- Ekawati S, Kirsfianti LG dan Mega L. 2013. Kondisi tata kelola hutan untuk implementasi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10(1) : 72-87.
- Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Guguk. 2018. *Dokumen Rencana Kerja Tahunan Hutan Adat Guguk tahun 2018-2020*. Guguk, Jambi, Indonesia.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Merangin. 2019. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Merangin Unit V Tahun 2019-2029*. Merangin, Jambi, Indonesia.
- Nababan A. 2008. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat: antara konsep dan realitas. seminar “ hutan tanaman rakyat, untuk apa dan siapa?” pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation, Muaro Jambi 5 November 2008.
- Novianti LE, Hamzah, Bambang H. 2022. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Imiah Universitas Batanghari Jambi*. 22 (1) : 261-265.
- Nugraheni BL, Agnes AC, Setiawan AN, Hudi P, Apelina T. Implementasi sistem tata kelola dan *e-supply chain* untuk peningkatan kapasitas perhutanan sosial. *Jurnal Warta LPM*. 25(3):334-345.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.
- Rahmina. 2011. *Pilihan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Forclime, Jakarta, Indonesia.
- Ridho M, Unti L dan Ali M. 2019. Integritas pemangku adat dan pemerintah desa dalam tata kelola pemerintah desa(studi kasus kebijakan perlindungan hutan adat lekuk 50 tumbi di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung

- Raya, Kabupaten Kerinci). 14(3): 2291-2298.
- Sardi I. 2012. Tinjauan sosiologi lingkungan dalam pengelolaan hutan adat di Desa Baru Pangkalan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*. 3(1).
- Satria HR. 2016. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada hutan nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Situmorang AW, Abdon N, Hariadi K, Jossi K, Mas AS, Myrna S, Purwadi S, Sofian E dan Sunaryo. 2013. *Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia*. LEAD. Jakarta, Indonesia.
- Subarudi. 2008. Tata kelola kehutanan yang baik: sebuah pembelajaran dari Kabupaten Sragen (*good forestry governance: a learning from Sragen District*). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5(3): 179-192.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Utami MP. 2017. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bali. *Tesis*. Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia.
- Westoby. 1968. *Changing Objectives of Forest Management*. New Delhi (IND): Assres to Ninth Commonwealth Forestry Conference.
- Widiyanto J, Basri H, dan Dahlan D. 2012. Potensi dan strategi pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*. 1(1):1-9.